

5 KESETARAAN
GENDER



unicef 
untuk setiap anak

LAMPIRAN

KOMPENDIUM PRAKTIK BAIK

demi mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
untuk anak di Indonesia

2021

1	Mengurangi Pernikahan Anak Melalui Pendidikan Keterampilan Hidup di Sekolah dan Memperkuat Platform Kesehatan Berbasis Sekolah	Sulawesi Selatan	2
---	--	------------------	---



Mengurangi Pernikahan Anak Melalui Pendidikan Keterampilan Hidup di Sekolah dan Memperkuat Platform Kesehatan Berbasis Sekolah

Topik: Perlindungan anak

Lokasi: Sulawesi Selatan (Bone)

Rangkuman Pendekatan

Angka pernikahan anak masih tergolong tinggi di Sulawesi Selatan dengan hampir 34 persen perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun, lebih tinggi daripada angka nasional dengan 25,7 persen (BPS, 2017). Rata-rata, sekitar 6.500 kasus pernikahan anak per tahun terjadi di Sulawesi Selatan (BPS 2016).

Pemerintah provinsi telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut dengan menyusun rencana aksi yang melibatkan pemangku kepentingan dari pihak pemerintah dan non-pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan. Salah satu strategi penting adalah mendorong anak-anak untuk menjadi agen pelapor dan pelopor yang aktif menghindari perilaku berisiko yang dapat berujung pada pernikahan anak.

Untuk melengkapi upaya pemerintah, UNICEF menyusun strategi intervensi berdasarkan kerangka kerja pendidikan keterampilan hidup (PKH). Dari himpunan keterampilan hidup inti yang dikonseptualisasikan oleh badan-badan PBB dan *Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning*, PKH mencakup tiga kategori: (i) kognitif (keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah); (ii) pribadi (keterampilan kesadaran, motivasi, dan manajemen diri); dan (iii) interpersonal (keterampilan komunikasi, negosiasi, kerja sama, dan kerja tim, serta inklusi, empati, dan advokasi).

PKH tentang kesehatan seksual dan reproduksi, manajemen kebersihan menstruasi, dan pernikahan anak dibahas dalam kerangka kerja inti pada intervensi UNICEF, yang diberi nama 'BERANI'. Dilaksanakan di Kabupaten Bone sejak Mei 2019, BERANI menggunakan pendekatan multi sektor untuk meningkatkan keterampilan hidup remaja dan meningkatkan lingkungan yang menghentikan langgengnya pernikahan anak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anak perempuan memiliki akses pendidikan dan mengatasi norma gender dan sosial yang mengarah pada pernikahan anak.

Kabupaten Bone dipilih sebagai lokasi percontohan karena memiliki prevalensi paling tinggi, yakni 25 persen (dua kali lebih tinggi dari rata-rata provinsi Sulawesi Selatan). Kantor Kementerian Agama Kabupaten mencatat terdapat 127 kasus pada tahun 2016 dan 2017 serta 191 kasus pada tahun 2018 dengan rata-rata peningkatan 20 persen per tahun. Prevalensi pernikahan anak memiliki dampak negatif terhadap peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2017, IPM Bone adalah 64,16, antara lain disebabkan rendahnya skor indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, terutama di kalangan anak perempuan.

Melalui kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan mitra lokal LPP Bone, BERANI dilaksanakan di enam kecamatan percontohan dengan melibatkan pemimpin agama dan tokoh masyarakat, sekolah dan guru, serta para remaja. Program tersebut berupaya untuk menjangkau sedikitnya 3.000 remaja di 12 sekolah serta 2.000 tokoh agama dan anggota masyarakat.



<p>Hasil Penting yang Dicapai</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 4.812 anak menerima pelatihan tentang PKH di sekolah percontohan dan replikasi. Angka ini lebih tinggi dari target awal. Evaluasi program menunjukkan hanya satu dari 2.328 anak perempuan dari kelompok sasaran yang gagal dicegah menikah dini. • Kegiatan pelatihan menghasilkan 25 pelatih level kabupaten dan 60 fasilitator guru. • Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah di 12 sekolah diberi pelatihan tentang manajemen PKH dan mendukung alokasi tambahan waktu dua jam untuk PKH dalam kurikulum sekolah. • 7 nota kesepahaman tentang pengembangan unit kesehatan sekolah (UKS) disepakati oleh sekolah dan puskesmas. • Pemberlakuan empat surat edaran: (i) surat edaran Bupati Bone tentang pemilihan sekolah yang berpartisipasi dalam program BERANI dan (ii) inisiatif peningkatan kesehatan masyarakat; (iii) surat edaran dari kepala dinas pendidikan tentang tambahan waktu dua jam untuk PKH di sekolah percontohan; (iv) surat edaran Kepala Kantor Departemen Agama, tentang pencegahan pernikahan anak di sekolah Islam. • Selama pandemi COVID-19, sesi pelatihan 22 modul PKH di 86 kelas di 12 sekolah untuk siswa kelas 7 dan 8 berlangsung melalui metode daring. • Selain itu, selama pandemi, Kabupaten Bone bermitra dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk mengadakan 20 sesi PKH. Program ini menjangkau 20.617 pendengar siswa sekolah menengah pertama (5.908 anak laki-laki, 14.609 anak perempuan).
<p>Replikasi/ peningkatan skala program</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 12 sekolah percontohan dan 14 sekolah/madrasah replikasi berkomitmen untuk melanjutkan pelaksanaan PKH. • Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone memilih dan mengalokasikan dana untuk 14 sekolah replikasi - tujuh sekolah umum dan tujuh madrasah sehingga menambah 1.295 penerima manfaat. • Draf surat keputusan (SK) bupati tentang PKH sebagai muatan lokal di kurikulum sekolah dasar dan menengah dibahas pada akhir tahun 2020. Draf tersebut mengharuskan PKH dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dan pelaksanaannya dicatat dalam data pokok pendidikan. • Keberlanjutan di tataran kebijakan telah direncanakan melalui penyusunan dokumen strategis kabupaten oleh Bappeda tentang pencegahan pernikahan anak dan peraturan lain, termasuk untuk mencapai status Kabupaten Layak Anak dengan kategori madya. • Enam desa menyusun peraturan tentang pencegahan pernikahan anak, yang ditinjau oleh dewan desa masing-masing pada akhir tahun 2020.
<p>Biaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Training of trainer</i> 4 hari: Rp2 juta (137 dolar AS)/orang • Pelatihan 4 hari untuk guru: Rp4,5 juta (307 dolar AS)/orang • Pelatihan 1 hari tentang manajemen PKH untuk kepala sekolah: Rp1,2 juta (82 dolar AS)/orang • Pencetakan modul guru: Rp25.000 (1,8 dolar AS)/buku • Pencetakan buku kerja siswa: Rp45.000 (3 dolar AS)/buku.



	Kete-rampilan	<ul style="list-style-type: none">• Pendampingan• Penerapan modul PKH
	Pemangku kepen-tingan	<ul style="list-style-type: none">• Bappeda• Dinas Pendidikan Kabupaten• Kantor Kementerian Agama Provinsi• Kepala sekolah dan guru• Dewan penasihat UKS.
Pembelajaran		<ul style="list-style-type: none">• Faktor utama keberhasilan pelaksanaan PKH untuk remaja adalah komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, kepala sekolah, dan guru.• Kerja sama antara Tim Pembina UKS, kepala sekolah, dan puskesmas mempermudah pelaksanaan strategi UKS di sekolah-sekolah• Kebijakan pemerintah yang baik harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat luas dalam pelaksanaannya.
Referensi dan informasi lebih lanjut		<ul style="list-style-type: none">• Modul PKH: bit.ly/modulpkh_bone• Video PKH saat pandemi Covid-19: www.youtube.com/channel/UCPPbJaJ9882Aol4Vy3OAV0w/videos• Buku Cerita MKM: bit.ly/buku-rahasia2dunia
Informasi kontak		<ul style="list-style-type: none">• Amelia Tristiana, Spesialis Perlindungan Anak UNICEF (atristiana@unicef.org)• Derry Ulum, Staf Pendidikan UNICEF (dulum@unicef.org)• Hj. Samsidar, SPi., MSi - Sekretaris Bappeda Kabupaten Bone (sidarhajja@yahoo.com)

